

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa advokasi terhadap OGBV tidak lagi dapat dipahami sebagai praktik yang bertumpu semata pada kapasitas organisasi, melainkan sebagai proses yang berlangsung dalam jaringan advokasi digital yang kompleks dan terhubung. Dalam TAN, praktik advokasi SAFEnet merefleksikan mekanisme *information politics* dan *symbolic politics*, di mana organisasi berperan dalam memproduksi dan mendistribusikan informasi strategis sekaligus meringkai isu OGBV sebagai persoalan struktural yang berkaitan dengan ketimpangan gender dan perlindungan hak digital.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa SAFEnet tidak hanya berfungsi sebagai produsen informasi, tetapi juga sebagai aktor yang membangun resonansi isu melalui framing yang relevan dengan pengalaman publik. Informasi dan narasi yang diproduksi tidak berhenti pada level organisasi, melainkan berkembang melalui interaksi dalam jaringan digital yang memungkinkan partisipasi individu dalam memperluas distribusi informasi serta memperkuat pemaknaan terhadap isu OGBV. Dengan demikian, efektivitas advokasi tidak hanya ditentukan oleh kapasitas institusional, tetapi oleh kemampuan jaringan dalam mereproduksi informasi dan makna secara kolektif.

Penelitian ini menegaskan bahwa mekanisme advokasi tersebut dioperasionalkan melalui pola *connective action*, khususnya dalam bentuk *organizationally enabled networks*, di mana advokasi berlangsung secara terdesentralisasi, fleksibel, dan berbasis partisipasi digital. SAFEnet berperan sebagai fasilitator yang menyediakan infrastruktur konektivitas, ruang partisipasi, serta kerangka narasi yang memungkinkan individu dan aktor lain untuk terlibat dalam proses advokasi. Dalam konteks ini, distribusi informasi dan pembentukan makna tidak lagi bersifat satu arah, melainkan berkembang melalui proses berbagi, reproduksi pesan, dan interaksi dalam jaringan digital.

Dalam praktiknya, penanganan kasus OGBV juga menunjukkan karakter jaringan kolaboratif lintas aktor, termasuk organisasi masyarakat sipil di tingkat

nasional dan internasional, komunitas lokal, serta individu. Kolaborasi ini mencerminkan bahwa advokasi tidak terpusat pada satu aktor, melainkan bergantung pada kemampuan jaringan dalam mengintegrasikan sumber daya, informasi, dan kapasitas yang tersebar. Kondisi ini menjadi semakin relevan dalam konteks keterbatasan respons negara dan platform digital terhadap kasus OGBV, sehingga jaringan advokasi berperan sebagai alternatif mekanisme perlindungan dan penanganan isu.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa advokasi OGBV oleh SAFEnet merepresentasikan bentuk *networked advocacy* yang mengintegrasikan struktur dan strategi dalam TAN dengan mekanisme partisipatif dalam *connective action*. Model ini menunjukkan adanya pergeseran dari advokasi yang bersifat terpusat menuju advokasi berbasis jaringan digital, di mana efektivitas advokasi ditentukan oleh kemampuan dalam mengelola informasi, membangun makna, serta mengaktifkan partisipasi publik. Temuan ini menegaskan bahwa dalam konteks hubungan internasional kontemporer, interaksi antara aktor non-negara dan teknologi digital menjadi faktor kunci dalam membentuk perhatian publik serta mendorong respons terhadap isu global seperti OGBV.

4.2. SARAN

Pertama, bagi pengembangan penelitian selanjutnya, kajian mengenai advokasi digital terhadap isu OGBV masih memiliki ruang eksplorasi yang luas, terutama dalam mengkaji lebih dalam hubungan antara mekanisme *information politics*, *symbolic politics*, dan dinamika *connective action*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis wawancara dan analisis dokumen, sehingga penelitian lanjutan disarankan untuk mengombinasikan metode lain, seperti analisis media sosial berbasis data, wawancara dengan lebih banyak aktor jaringan lintas negara, maupun pendekatan kuantitatif untuk mengukur pola penyebaran informasi dan tingkat partisipasi publik secara lebih komprehensif.

Kedua, bagi organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam isu hak digital, termasuk SAFEnet, penelitian ini menunjukkan pentingnya memperkuat strategi advokasi yang tidak hanya berfokus pada produksi informasi, tetapi juga pada

kemampuan membangun framing isu yang kontekstual serta mendorong partisipasi publik dalam jaringan digital. Oleh karena itu, organisasi advokasi diharapkan dapat terus mengembangkan strategi kampanye digital yang inklusif, memperluas kolaborasi lintas sektor dan lintas negara, serta meningkatkan kapasitas literasi digital masyarakat agar mampu mengenali, merespons, dan mencegah berbagai bentuk OGBV secara lebih efektif.

Ketiga, bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa OGBV merupakan persoalan struktural yang memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Penanganan isu ini tidak cukup hanya melalui regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan penguatan ekosistem advokasi yang melibatkan masyarakat sipil, komunitas, dan platform digital. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada perlindungan korban, peningkatan literasi digital, serta penguatan kerja sama multi-aktor guna menciptakan ruang digital yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan berbasis gender.